

**HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT
MENURUT PANDANGAN AN NAWAWI
DAN IBN TAIMIYYAH**

SKRIPSI

**VIKA ZENY ALFIANA
NPM :1721030078**



Program Study : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2021 M**

**HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT
MENURUT PANDANGAN AN-NAWAWI
DAN IBN TAIMIYYAH**

Skripsi

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Abuzar Alghifari, M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Jual beli dengan cara tidak tunai saat ini banyak dipraktikkan dalam berbagai barang termasuk emas, baik jual beli yang dilakukan di toko emas maupun di sebuah lembaga keuangan syariah sekarang sudah banyak yang menjualnya secara tidak tunai/kredit. Hal ini tentunya bertujuan untuk menarik daya minat masyarakat dalam membeli emas. Tetapi, untuk sekarang ini masih banyak masyarakat yang bingung dan masih bertanya-tanya tentang kebolehan membeli emas secara kredit. Berkaitan dengan hal tersebut, telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan menjual emas secara kredit, ada yang memperbolehkannya seperti Ibn Taimiyah dan ada yang tidak memperbolehkannya seperti Imam an Nawawi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan An Nawawi dan Ibn Taimiyyah tentang hukum jual beli emas secara kredit dan bagaimana Istimbath hukum An Nawawi dan Ibn Taimiyyah tentang jual beli emas secara kredit. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan An Nawawi dan Ibn Taimiyyah tentang hukum jual beli emas secara kredit serta untuk mengetahui Istimbath hukum An Nawawi dan Ibn Taimiyyah tentang jual beli emas secara kredit.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat *analisis kualitatif komparatif* yaitu metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian terkait perbedaan pandangan dari kedua imam tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengutip dari sumber-sumber bacaan yang relevan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap *editing* dan *sistemizing*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa An Nawawi berpendapat jual beli emas secara kredit itu tidak diperbolehkan, karena menurut beliau emas termasuk kedalam barang ribawi. Sedangkan Ibn Taimiyyah berpendapat membolehkan jual beli emas secara kredit karena beliau menganggap emas sebagai barang biasa bukan lagi sebagai alat tukar. Istimbath hukum yang digunakan, An Nawawi beristinbath hukum kepada hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Said al-Khudri, bahwa emas itu termasuk barang-barang ribawi yang tidak boleh diperjualbelikan secara kredit artinya harus dilakukan secara kontan/tunai. Sedangkan Ibn Taimiyyah beristinbath kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah ibn al-Samit, di dalam hadits tersebut dijelaskan

tentang barang ribawi. Tetapi Ibn Taimiyyah memahami hadits tersebut secara kontekstual dengan melihat kondisi zaman, dan beliau mengqiyaskan emas tersebut sebagai barang pada umumnya yang bisa diperjualbelikan baik secara kredit maupun tunai, bukan lagi sebagai alat tukar.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vika Zeny Alfiana
NIM : 1721030078
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT MENURUT PANDANGAN AN NAWAWI DAN IBN TAIMIYYAH” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung, 05 April 2021
Penulis,



Vika Zeny Alfiana
NPM. 1721030078



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarama, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT
MENURUT PANDANGAN AN-NAWAWI DAN IBN
TAIMIYYAH**

Nama : Vika Zeny Alfiana

NPM : 1721030078

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197012282000031002

Abuzar Alghifari, M.Ag.

NIP. 198712222019031006

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Khoiruddin M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT MENURUT PANDANGAN AN-NAWAWI DAN IBN TAIMIYYAH”** disusun oleh **Vika Zeny Alfiana**, NPM 1721030078, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Oktober 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin M.S.I.

(.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

(.....)

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

(.....)

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.

(.....)

Penguji III : Abuzar Alghifari, M.Ag.

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah[2]:275)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, terimakasih dan rasa hormat yang tak terhingga kepada:

1. Bapak tercinta Saimun dan Ibu tercinta Katinem yang selalu senantiasa mendo'akan, membimbing dengan penuh kasih sayang, dan selalu memberi dukungan baik moril maupun materil, hal itu tak lain demi keberhasilan cita-cita dan kesuksesanku di masa depan. Terimakasih Bapak dan Ibu.
2. Kakak-kakaku tercinta Eny Apriyanti Amd.Kep, Naini Armitasari S.pd, Khairu Isnanto S.T, dan adik kesayanganku Teguh, serta semua keluarga besarku kalian semua adalah motivasiku, penyemangat, dan tempat menumpahkan seluruh keluh dan kesahku, terimakasih atas do'a, dukungan dan kasih sayangnya.
3. Teruntuk temanku , Shinta Adelia, Sutiarni, Wiwin Parwati, Teman kelas, dan semua Teman-temanku, terimakasih kalian selalu menemani, membantu, memberi motivasi, mendo'akan dan selalu menyemangatiku dalam pembuatan skripsi ini.
4. Almameter tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Vika Zeny Alfiana, putri dari pasangan Bapak Saimun dan Ibu Katinem. Lahir di Gumuk Mas, Pringsewu pada tanggal 26 januari 1999. Penulis mempunyai 4 saudara kandung yaitu 3 seorang kakak yang bernama Eny Apriyanti, Naini Armitasari, Khairu Isnanto dan 1 seorang adik yang bernama Teguh.

Riwayat pendidikan penulis yaitu menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Sidomulyo pada tahun 2005 sampai 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Sidomulyo, pada tahun 2011 sampai 2014, setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Sidomulyo pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dan mengambil Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur saya curahlimpahkan kehadiran Allah SWT ,Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat iman, islam dan nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT MENURUT PANDANGAN AN-NAWAWI DAN IBN TAIMIYYAH”**. Sholawat beriringkan salam semoga selalu senantiasa tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang yaitu zaman berilmu pengetahuan, seperti yang dapat kita rasakan sampai saat ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja banyak sekali pihak-pihak yang terlibat, yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan semangat, motivasi, do'a dan dukungan, oleh karena itu, tak lupa saya haturkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ketua Jurusan Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I., dan Sekertaris jurusan Muamalah Fakultas Syariah Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. . selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing, dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak / Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan.
6. Kepada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang turut memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Sahabat-sahabatku sekaligus teman diskusi khususnya teman-teman kelas, Teman-teman KKN, dan Teman-teman PPS, serta semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan banyak terimakasih atas suport yang selalu kalian berikan.
8. Almameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan kalian semua dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amiin Yarobbal ‘alamin.

Bandar Lampung, 05 April 2021

Penyusun

Vika Zeny Alfiana
NPM. 1721030078



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
4. Macam-macam Jual Beli	27
5. Larangan-larangan yang Dapat Merusak Jual Beli	30
6. Jual Beli Emas	31
B. Kredit	33
1. Definisi Kredit	33
2. Hukum Jual Beli Kredit	35

3. Syarat Jual Beli Kredit	37
4. Jenis-Jenis Kredit	39
5. Fungsi dan Tujuan Kredit.....	40

BAB III HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT MENURUT PANDANGAN AN NAWAWI DAN IBN TAIMIYYAH

A. Pandangan An Nawawi.....	45
1. Biografi An Nawawi	45
2. Karya-karya An Nawawi.....	48
3. Metode Istibath An Nawawi.....	48
4. Pandangan An Nawawi terhadap jual beli emas secara kredit	50
B. Ibn Taimiyyah.....	53
1. Biografi Ibn Taimiyyah	53
2. Karya-karya Ibn Taimiyyah	58
3. Metode Istibath Ibn Taimiyyah	59
4. Pandangan Ibn Taimiyyah terhadap jual beli emas secara kredit	61

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pandangan An Nawawi dan Ibn Taimiyyah Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit.....	65
B. Istibath Hukum An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah Terkait Jual Beli Emas Secara Kredit	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka perlu dijelaskan beberapa istilah dalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “**Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Pandangan An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah**” Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang di akui dan di yakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹
2. Jual beli adalah adanya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu.² Maksud dari sesuatu disitu adalah pertukaran harta (*mal*) dengan sesuatu yang mempunyai manfaat.
3. Emas, yang dimaksud disini ialah logam mulia atau murni yang memiliki nilai tinggi, berwarna kuning mengkilap dan biasa dibuat perhiasan.³
4. Kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu antara penjual ataupun pembeli.⁴ Kredit yang dimaksudkan oleh penulis disini adalah sebuah sistem yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dalam melakukan akad jual beli emas.

¹ Eva Iryani, ”Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No.2 (2017): 24.

² Dimyauddin Duwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve 2006), 1405-1406

⁴ Sahruwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 142.

5. An Nawawi, bernama lengkap Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husen bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizami An-Nawawi, adalah seorang pemikir muslim dalam bidang fiqh dan hadits. Beliau lahir di kota Nawa Damaskus pada tahun 631 H, kemudian beliau meninggal pada tahun 676 H di kota kelahiran Nawa Damaskus.⁵
6. Ibn Taimiyyah, bernama lengkap Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah seorang pemikir dan ulama Islam yang berasal dari Harran, Turki. Ibnu Taimiyah lahir pada hari senin 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H atau bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di Harran, daerah yang terletak di tenggara negeri Syam.⁶ Kemudian beliau meninggal pada tahun 728 H, di Damaskus, Kesultanan Mamluk.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan maksud judul skripsi ini adalah menganalisis pandangan An Nawawi dan Ibn Taimiyyah tentang hukum jual beli emas secara kredit.

B. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa dalam melakukan sesuatu secara sendiri, sudah pasti memerlukan orang lain disekitarnya untuk hidup bermuamalah. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Diantara sekian

⁵ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, terj: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Moh. Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 54.

⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj: Masturi Ilham & Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 783..

banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.

Persoalan muamalah di dalamnya tidak bisa dipisahkan dari akad (transaksi), karena dengan akad tersebut, kedua belah pihak terikat secara hukum dalam bermuamalah. Dalam melakukan transaksi jual beli, Islam tentunya telah menentukan aturan-aturan dan tidak terlepas dari rukun-rukun serta syarat-syaratnya. Oleh karena itu, dalam praktek jual beli haruslah dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Jual beli termasuk salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya saling tolong menolong sesama manusia. Allah SWT telah menjelaskan dalam firman-Nya yaitu Al-Qur'an dan Nabi Saw dalam hadits-haditsnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.⁷

Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya untuk mencukupi kebutuhan. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu bekerjasama dengan orang lain agar kebutuhannya bisa tercukupi. Tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.⁸

⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.5

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.159

Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam suatu transaksi jual beli, cara pembayaran bisa secara tunai maupun ditunda, sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian pembayaran yang ditunda itu ada dua model, yaitu secara kredit melalui pembayaran dengan jumlah tertentu pada setiap angsuran, atau secara hutang yang dibayar sekaligus ketika jatuh tempo.

Allah telah memberikan ketentuan dalam firman-Nya surat an-Nisa' 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa' : 29)

Zaman sekarang ini, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak mengalami perubahan, begitupun dalam hal bermuamalah. Perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang atau dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama dan keputusan-keputusan pengadilan agama.

Emas merupakan salah satu investasi yang cukup diminati oleh masyarakat saat ini, karena nilai yang stabil dan sebagai investasi dimasa depan. Sehingga banyak masyarakat yang membeli emas baik secara tunai maupun

secara kredit. Pembelian emas secara tidak tunai atau kredit banyak dipilih masyarakat dengan alasan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dengan cara yang mudah.

Menurut pandangan jumhur ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan sebagian Hanbilah, jika seseorang membeli emas diharuskan secara tunai, karena uang dan emas merupakan barang ribawi yang masih satu golongan, maka disyaratkan harus tunai. Berbeda dengan pandangan Ibn Taimiyyah, menurutnya jual beli emas tidak disyaratkan tunai selama emas tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat tukar menukar. Salah satu ulama yang hampir sezaman dengan Ibn Taimiyyah adalah An-Nawawi, yang pandangannya berbeda dengan Ibn Taimiyyah. Menurutya keharaman riba pada emas bukan hanya terletak pada emas yang dijadikan sebagai alat tukar menukar, tetapi juga terletak pada emas batangan, emas perhiasan dan wadah yang terbuat dari emas.

Oleh karena itu terkait jual beli emas secara kredit masih banyak perbedaan pendapat yang menyebutkan kebolehan atau ketidak bolehan. Dari sinilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **"HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT MENURUT PANDANGAN AN-NAWAWI DAN IBN TAIMIYYAH."**

C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian Penelitian ini di fokuskan kepada pendapat An Nawawi dan Ibn Taimiyyah terhadap jual beli emas secara kredit.
2. Sub-Fokus Penelitian
 Penelitian ini difokuskan pada *Istinbath* hukum An Nawawi dan Ibn Taimiyyah tentang jual beli emas secara kredit.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut, maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual beli emas secara kredit menurut pandangan An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah ?
2. Bagaimana *istinbath* hukum An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah terkait jual beli emas secara kredit?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum jual beli emas secara kredit menurut Ibn An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah.
2. Untuk mengetahui *Istinbath* hukum An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah terkait jual emas secara kredit.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi serta pengembangan ilmiah terkait hukum jual beli emas secara kredit.
2. Secara praktis, penelitian ini dilakukan serta dimaksudkan sebagai sarana informasi bagi masyarakat serta dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

G. Kajian Penelitian Relevan

Di antaranya, penelitian yang dilakukan Aida Rachman pada tahun 2014, dengan judul “Jual beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot-Tangerang)”. Kesimpulan (hasil) dari penelitian tersebut yaitu, jual beli emas secara kredit menurut perspektif hukum Islam terdapat dua pendapat. Pertama dilarang, pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki,

Syafi'i, dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani. Kedua boleh, pendapat ini didukung oleh pendapat Ibn Taymiyah, Ibnu Qayyim dan beberapa ulama kontemporer.

Ulama yang melarang berpendapat bahwa emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *tsaman* (harga) melainkan *sil'ah* (barang).⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Seruni Harumsari pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Pegadaian Konvensional Cabang Kartasura”. Kesimpulannya (hasil) dari penelitian tersebut yaitu, jual beli emas secara tidak tunai atau angsuran di PT Pegadaian (Persero) Kartasura dalam prakteknya sudah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Dalam prakteknya memang diharuskan emas untuk ditahan oleh pihak pegadaian sebagai jaminan atas transaksi jual beli secara tidak tunai tersebut. Hal ini dikarenakan agar nasabah rutin dan tepat waktu dalam membayar angsuran agar emas dapat segera didapatkan. Emas yang digunakan sebagai jaminan di sini bukan berarti dalam prosesnya terdapat dua akad dalam satu kali transaksi, namun akad yang digunakan hanya akad jual beli dengan jaminan agar nasabah tertib dalam membayar angsuran. Sedangkan akad gadai hanya dapat dilakukan bila nasabah telah menyelesaikan angsuran. Jika, nasabah terlambat dalam membayar angsuran maka akan

⁹ Aida Rachman, “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 65.

dikenakan denda yang dimaksudkan agar nasabah tidak lalai atau terlambat dalam membayar angsuran.¹⁰

Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Ryco Putra Irawan, pada tahun 2014 dengan judul “Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)”. Kesimpulannya (hasil) dari penelitian tersebut yaitu, berdasarkan hasil analisis maka Relevansi fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan pendapat para ulama mazhab adalah revelan kepada ulama mazhab yang membolehkan. Pada dasarnya jual beli emas ini ada dua pendapat ulama yang berbeda yaitu ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Pertama, para imam Mazhab empat sepakat bahwa emas termasuk kedalam jenis barang ribawi dan dalam jual belinya disyaratkan tunai, mereka memandang emas walau dalam bentuk dan kondisi apapun tetap melekat sifat pada emas tersebut nilai. Kedua, adalah ulama Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayyim bahwa pertama, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).¹¹

Setelah mengetahui terkait penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, maka terdapat perbedaan serta persamaan dalam skripsi saya, letak perbedaannya yaitu penelitian yang saya lakukan ini adalah

¹⁰ Seruni Harumsari, Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Terhadap Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Pegadaian Konvensional Cabang Kartasura, (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 9.

¹¹ Ryco Putra Irawan, Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Praktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010, (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 100.

penelitian pustaka, selain itu penelitian ini untuk mengkaji dua pendapat ulama tentang hukum jual beli emas secara kredit, dan untuk mengkaji istinbath hukum jual beli emas secara kredit yang digunakan oleh kedua ulama tersebut. Kemudian letak persamaannya yaitu pembahasan isi skripsi serta objek pembahasannya yang sama-sama membahas tentang jual beli emas secara kredit.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Jenis penelitian

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber primer yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan juga untuk mengetahui serta mendapatkan konsep para ilmuwan sebagai landasan teori dari skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *hukum normatif* atau penelitian *hukum doktriner* yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹² Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas hukum Islam mengenai hukum jual beli emas secara kredit menurut pandangan An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah. Oleh karena itu, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif-komparatif*, dimana

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cetakan ke 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 13.

penulis membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pandangan An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah tentang hukum jual beli emas secara kredit.¹³ Kemudian dibandingkan (komparasi) dan dianalisa untuk mencari sebab yang melatar belakangi pandangan diantara mereka.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sekunder dan tersier. Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primernya adalah karya An Nawawi seperti kitab *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab* dan karya Ibn Taimiyyah yaitu kitab *Majmu' al – Fatawa*. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang masih berkaitan dengan permasalahan muamalah di antaranya adalah buku karangan Hendi Suhendi dengan judul *Fiqh Muamalah*, buku karangan Enang Hidayat dengan judul *Fiqh Jual Beli*, buku karangan Dimyauddin Duwaini dengan judul *Pengantar Fiqh Muamalah*. Adapun data tersier adalah data yang diperoleh dari kamus, koran, brosur, majalah dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik kitab-kitab, buku-buku, majalah-majalah, dan sumber bacaan lainnya yang terdapat diruang perpustakaan, dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah dalam skripsi ini.

¹³ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, cetakan ke 5 (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 19.

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, dengan cara pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*sistemizing*),¹⁴ dengan uraian sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini setelah data terkumpul kemudian diperiksa ulang apakah sudah cukup lengkap, benar dan sudah sesuai relevan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Penandaan data

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, literatur, perundang-undangan atau dokumen). Pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbitan); atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A dan masalah kedua tanda B, dan seterusnya). Rekontruksi data (*recontrukting*) yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematika Data (*sistemizing*)

Melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Metode Analisis Data

Dalam hal ini digunakan jenis penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku orang yang dapat diamati.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, 126.

¹⁵ Lexy J Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Resda Karya, 2001), 208.

Sejalan dengan definisi tersebut krik dan Muler mendefinisikan bahwa jenis penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Jenis penelitian kualitatif dalam skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak menggunakan angka-angka.¹⁶

Kesimpulan akhir menggunakan metode komparatif yaitu metode cara berfikir dengan membandingkan data-data dari hasil penelitian tentang pandangan antara An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah mengenai Hukum jual beli emas dengan cara kredit.¹⁷

Dalam metode ini dibandingkan pandangan antara An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah mengenai jual beli emas secara kredit, dari metode ini diharapkan akan memperoleh data-data objektif sehingga dapat menjawab permasalahan diatas.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Pandangan Ibn Taymiyah dan Imam an Nawawi, maka sistematikan penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 5 bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu

¹⁶ *Ibid*, 300.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), 36.

yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang jual beli, jual beli emas, dan kredit. Tinjauan umum tentang jual beli terdiri dari pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, larangan-larangan yang dapat merusak jual beli, tinjauan umum tentang jual beli emas terdiri dari pengertian dan fenomena jual beli emas pada saat ini, dan tinjauan umum tentang kredit terdiri dari definisi kredit, jenis-jenis kredit, fungsi kredit, hukum jual beli kredit.

BAB III : PANDANGAN AN NAWAWI DAN IBN TAIMIYYAH TENTANG HUKUM JUAL EMAS SECARA KREDIT

Dalam bab ini berisi tentang biografi, karya-karya, metode istinbath An Nawawi dan Ibn Taimiyyah, serta pandangan An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah terhadap jual beli emas secara kredit.

BAB IV : ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi tentang analisi pendapat An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah tentang jual beli emas secara kredit, dan istinbath hukum An-Nawawi dan Ibn Taimiyyah tentang jual beli emas secara kredit.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak. Atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah, “*Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan*”.¹⁸

Berdasarkan pendapat diatas, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberi barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.

Allah SWT. Mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarananya adalah dengan jalan melakukan jual beli.¹⁹

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

¹⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers 2016), 63.

¹⁹ *Ibid*, h. 64

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.²⁰

b. Menurut Imam Nawawi

Dalam kitab *al-Majmu 'Syarah al-Muhadzab*, jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيًا²¹

“Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

c. Menurut Ibnu Qudamah

Dalam kitab *al-Mughni* menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).²²

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau

²⁰ Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 253.

²¹ Abu Zakaria bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu Syarah al-Muhadzab*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 149

²² Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris* ,..., 253

ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut disebut *fasid*.²³ Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

²³ Hendi Sunhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 69.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemnafaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Tidak sedikit kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, bahkan melupakannya, sehingga tidak memperdulikan apakah yang dilakukan dalam jual beli itu haram atau tidak. Keadaan seperti itu merupakan kesalahan besar yang harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada bidang perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak.

Bagi mereka yang terjun dalam dunia usaha, khususnya perdagangan atau transaksi jual beli, berkewajiban mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan jual beli tersebut sah atau tidak. Ini bertujuan supaya usaha dilakukan sah secara hukum terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan.

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas yaitu:

²⁴ *Ibid.*, 70.

a. Al-Qur'an diantaranya:

1) Surah al-Baqarah (2) ayat 257

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah [2]:275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat diatas juga dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam dan tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam.

2) Surah al-Baqarah (2) ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
 تَعْلَمُونَ

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

(QS.Al-Baqarah [2]:188)

Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 188 bahwa keharusan mengidahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan batil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Penggunaan kata makan dalam ayat diatas untuk melarang memeproleh harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder maupun primer.

b. As-Sunnah

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم
 السئل اي الكسب اطيب ؟ قال عمل الرجل بيده، وكل بيع
 مبرور. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Rifa'ah bin Rafi' mengatakan bahwasannya Nabi saw. ketika ditanya usaha apa yang terbaik. Jawab Nabi saw: Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap jual beli yang halal. (H.R. Al-Bazzar dan disyahkan oleh Al-Hakim)

Berdasarkan hadis di atas, Nabi saw telah menghalakan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, maksud dari pekerjaan dengan tangannya sendiri disini adalah sendiri untuk melakukan peniagaan dan diajurkan oleh Nabi saw.

c. Ijma'

Jumhur ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang harus mengetahui apa saja yang dapat mengakibatkan suatu perdagangan atau jual beli itu sah secara hukum. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Allah swt mengharamkan adanya riba dan usaha yang paling baik adalah usaha yang dihasilkan dari tangannya sendiri, tentunya dari hasil usaha yang halal pula.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Oleh karena, perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

a. Rukun jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari :

- 1) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- 2) Adanya uang dan benda
- 3) Adanya lafal

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila kata salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

b. Syarat sahnya jual beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

1) Tentang subjeknya

kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah

- (a) Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya;
- (b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- (c) Keduanya tidak mubazir;
- (d) Baligh

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar suatu jual beli harus dilakukan atas kehendak sendiri, dapat dilihat dari ketentuan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan (jual beli, pen) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....” (QS. An-Nisa’ (4): 29).

Perkataan suka sama suka dalam ayat diatas, menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.

Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros dalam hkum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudna, dia tidak dapat melakukan sendiri tindakan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan/perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk kepentingannya

adalah pengampuannya/walinya. Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

“janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa (4):5).

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan belum sempurna akalanya oleh penafsir diartikan sebagai anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak mengatur hartanya.

Kalimat mereka yang ada dalam kekuasaanmu menunjukan bahwa walilah yang bertanggung jawab penuh untuk segala perbuatan hukum guna kepentingan orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Persyaratan selanjutnya tentang objek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli tersebut adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15 (lima belas) tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian, jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Meskipun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang

baik dan mana buruk, tetapi belum dewasa (belum menapai 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian diperbolehkan melakukan melakukan perbuatan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

Andaikan anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum (seperti jual beli barang kecil dan tidak bernilai tinggi) yang sudah lazim di tengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi masyarakat. Sedangkan kita ketahui bahwa Hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran Bgi pemeluknya.

2) Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasasi, *pen*).

(a) Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang didiskualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Hal itu didasarkan kepada ketentuan: Dari Jabin Bin Abdullah, berkata Rasulullah saw.: ... sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual

arak (minuman yang memabukan dan bangkai, begitu juga babi dan berhalal).

(b) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio televisi, dan lain-lain.)

(c) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal, misalnya, seorang suami menjual barang milik istrinya tanpa mendapat izin atau kuasa dari istrinya. Perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Otomatis perjanjian jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu batal.

(d) Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang diadakannya sebagai objek jual beli sesuai dengan

bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

(e) Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

Sedangkan menyangkut pembayarannya, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

(f) Barang yang diakadkan ditangan

Meyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²⁵

4. Macam – macam Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui, antara lain yaitu:

a. Jual beli yang sah

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli tersebut disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak khiyar lagi, jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang sah. Misalnya, seseorang membeli sebuah

²⁵ Surahwardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 146.

kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya sah dan telah mengikat kedua belah pihak.²⁶

Ulama' sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang balig, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasarruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini:

1) Jual beli orang gila

Ulama' fikih sepakat jual beli orang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk dan lain-lain.²⁷

2) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.²⁸

3) Jual beli terpaksa

Menurut ulama' Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli fudul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilangnya rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mua'malah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 93

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 136

baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah, karena tidak ada kerida'an ketika akad.²⁹

4) Jual beli orang yang terhutang

Jual beli orang yang terhutang merupakan jual beli yang terhalang. Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, atau sakit. Jual beli orang bodoh yang suka mengharamkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat paling sahih dikalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah karena tidak ada ahli dan ucapannya tidak dapat dipegang.³⁰

b. Jual beli yang batil

Jual beli yang batil yaitu jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

b. Jual beli *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batil. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait memperjualbelikan barang-barang haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli tersebut dinamakan fasid.

Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan jual beli itu fasid dengan jual beli yang batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang sahih dan jual beli yang batil.

²⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 12 (Bandung: al-Ma'arif, 1996),

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mua'malah* ,....., 94

Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.³¹

c. Transaksi jual beli yang barangnya tidak ada di tempat akad

Transaksi jual beli yang barangnya tidak ada ditempat akad, hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klasifikasinya. Namun apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan, akad jual beli akan menjadi tidak sah, maka pihak yang melakukan akad dibolehkan untuk memilih menerima atau menolak, sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.

d. Transaksi atas barang yang sulit dan berbahaya untuk melihatnya

Diperbolehkan juga melakukan akad transaksi atas barang yang tidak ada ditempat akad, bila kriteria barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, misalnya makanan kaleng, obat-obatan dalam tablet, tabung-tabung oksigen, bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lainnya yang tidak dibenarkan untuk dibuka kecuali pada saat penggunaannya, sebab sulit melihat barang tersebut dan membahayakan.³²

5. Larangan-Larangan yang Dapat Merusak Jual Beli

Larangan yang dimaksud adalah larangan jual beli yang apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau hilang. Adapun larangan yang dapat merusak jual beli adalah sebagai berikut :³³

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* ,....., 125-126

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 131-132.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* ,....., 66-73.

- a. *Asbul al-Fahl* (jual beli sperma hewan pejantan)
- b. *Habl Al-Hablah* (hamilnya si janin)
- c. *Larangan* jual beli *Malaqih* (janin unta) dan *madhamin* (sperma yang ada dalam tulang punggung kuda)
- d. Larangan jual beli *Mulamasah* dan *munabadzah*
- e. Larangan jual beli *Hushat* (dengan kerikil)
- f. Larangan jual beli *Al-'Urbun*
- g. Larangan dua jualan dalam satu akad

6. Jual Beli Emas

Emas merupakan salah satu barang yang banyak diminati masyarakat, hal ini dikarenakan harga emas yang kuat dan relatif naik. Walaupun saat ini emas sudah tidak dijadikan sebagai alat tukar menukar, tetapi orang yang menyimpan emas tidak akan rugi, bahkan akan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, banyak orang yang tertarik untuk melakukan investasi emas.

Berinvestasi emas merupakan cara lama untuk membuat uang semakin banyak dan sebagai asuransi untuk bahaya yang tak dapat terlihat dimasa depan. Apabila ditelaah lebih mendalam, ternyata emas memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan sarana investasi lainnya. Tentunya dengan beberapa kondisi yang menunjang.³⁴

Adapun hukum mengenai memperjual belikan emas hukumnya adalah boleh dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash hadits yang shahih serta pendapat para ulama, hal itu karena emas termasuk harta riba. Telah disepakati oleh sebagian besar ulama, dalam jual beli emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi dikarenakan, 'iilatnya sama yaitu sebagai patokan harga dan dirham dengan

³⁴ Agung Parmono dan Andrian Kurniawan, "Penerapan Akutansi Perbankan Pembiayaan Emas iB Hasanah dan Gadai Emas", *Al-Mashraf*, vol. 2, no. 1 (2016), 48.

dinar (menjual uang perak dengan emas), atau menjual makanan dengan makanan lain yang tidak sejenis, maka menjualnya boleh berlebih atau berkurang. Hanya disyariatkan padanya “kontan sam kontan, dan tiimbang terima di majelis akad”. Jual beli barang yang sejenis yang didalamnya terkena hukum riba, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma.³⁵ Oleh sebab itu emas dan perak bisa dijadikan mata uang, sehingga para ulama hadits memahami uang berasal dari emas sebagai mata uang sejenis yaitu emas dengan istilah dan ukuran yang berbeda. Para ulama yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai para Imam Mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad Hanbali).

Benda-benda ribawi menurut ijma ada enam, yaitu: emas, perak, gandum, sya’ir, kurma, dan garam. Akan tetapi *‘iilat* emas dan perak beda dengan yang lainnya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i *iilat* emas dan perak karena menjadi patokan harga dan yang bisa disamakan dengan uang.³⁶ Jika melakukan jual beli emas dan perak mesti diterima masing-masing sebelum berpisah. Dan pendapat ini disetujui pula oleh Imam Malik. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *‘iilat* keharaman menjual emas dengan emas dan perak dengan perak secara tidak tunai, ialah benda-benda itu adalah benda-benda yang ditimbang, di samping kesamaan jenisnya, dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula karena benda-benda itu benda-benda yang disukat, dan sama hukumnya.³⁷ Jadi menurut jumhur ulama khususnya Imam Empat Mazhab, bahwa

³⁵ Vian Prasetyo, *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSNMUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Semarang: IAIN Walisongo, 2013), 20

³⁶ Ahmad Zakki Zamani, *Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai*, *Al-Banjari*, Vol. 15, no 1, Januari (2016), 88

³⁷ Ahmad Zakki Zamani, *Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai*,, 88

emas dan perak memiliki kesamaan *'ilat*, sedangkan kurma, gandum, sya'ir, dan garam juga memiliki *'ilat* tersendiri, dan hukumnya haram jika diperjualbelikan secara kredit.

B. Kredit

1. Definisi Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin "*creditum*" yang berarti kepercayaan atau kebenaran, atau *credo*, yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan.³⁸ Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

Kredit menurut istilah adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang. Sedangkan dalam syariah kredit dikenal dengan pembiayaan atau menyediakan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain mengembalikan pembiayaan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.³⁹

Dalam bukunya Sahruwandi K Lubis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu antara penjual ataupun pembeli.⁴⁰

³⁸ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, cet ke 3 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 32.

³⁹ Ahmad Gozali, *Serba-Serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga diantara Kita* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005) 56.

⁴⁰ Sahruwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 142.

Al-Amien Ahmed mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan jual beli kredit (*bai'at-taqhsith*) adalah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal dari pada pembayaran kontan.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Para ulama menyebutkan beberapa poin penting yang berkenaan dengan jual beli, yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam jual beli ini penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis didalam akad dengan pembeli bahwa ia berhak mendapat tambahan harga yang terpisah dari harga barang yang ada, dimana harga tambahan itu akan berkaitan erat dengan waktu pembayara. Baik tambahan harga itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada, baik dengan syarat yang sudah ada ataupun tanpa syarat, karena hal itu termasuk riba yang diharamkan.
- c. Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari tangan pembeli setelah terjadi jual beli, namun penjual diperbolehkan memberi syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan-cicilan yang tertunda.
- d. Boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yangngg dibayar secara langsung (cash).

- e. Diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda-nunda kewajibannya membayar cicilan, walaupun demikian syari'at tidak membolehkan si penjual untuk memberi syarat kepada pembeli agar membayar ganti rugi jika ia terlambat menunaikan kewajibannya (pembayaran cicilan)

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli kredit adalah pembeli suatu barang yang diberikan kepercayaan untuk membayar secara mengangsur atau secara cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dimana boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung (cash). Akan tetapi diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda-nunda kewajibannya dalam membayar cicilan tersebut

2. Hukum Jual Beli Kredit

Jual beli secara kredit dengan tambahan harga belum menyebar dan belum begitu dikenal oleh masyarakat zaman dulu, tetapi menyebar dan mendunia hingga menjadi semacam wabah penyakit yang menimpa penduduk dunia pada kurun waktu berikutnya. Oleh karena itu, cukup masuk akal jika kita tidak mendapatkan pembahasannya dalam kitab-kitab fiqh dan tidak pula dalam kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan pembahasan dalam fiqh. Masyarakat modern sekarang ini, pembelian barang secara kredit akhir-akhir ini banyak sekali terjadi.

Oleh karena memang ada anggota masyarakat yang membutuhkan suatu barang, tetapi tidak mempunyai uang tunai, dan tidak ada penjual barang tersebut kecuali dengan cara kredit dengan adanya tambahan harga. Sebaliknya, ada orang yang membutuhkan uang tunai tetapi tidak ada yang menghutangnya dengan cara yang baik (kecuali dengan bunga pula), sehingga tidak ada yang mneguntungkan baginya kecuali membeli secara kredit dengan ada tambahan harga. Hukum

jual beli kredit dengan tambahan harga, sedikitnya ada tiga pendapat ulama:

a. Haram secara Mutlak

Kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak jual beli kredit dengan harga tambahan, diwakili oleh mazhab Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah serta sebagaian ulama yang lain. Mereka beralasan karena ada tambahan harga yang berarti sama dengan haramnya riba.⁴¹ Sebagaimana firman Allah swt.:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"orang-orang yang memakan harta riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengramkan riba.... (QS. Al-Baqarah (2) : 275)

b. Hukumnya Boleh secara Mutlak

Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Karena merupakan konsekuensi dari nilai harga yang dihutang, dan akadnya mirip dengan akad memakai salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang. Seandainya pembelian tunai tentu uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi, karena pembelian kredit otomatis uangnya macet di tangan pengkredit. Oleh karena itu, secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambahan tersebut tidak memberatkan dan bernilai

⁴¹ Muhibbuddin, "Kredit: Suatu Perjanjian Perspektif Hukum Islam," *Al-Mizan*, Vol. 13, no 02 (2017), 231.

ekonomis bagi si pemberi dan si penerima kredit. Jika nilai tambahan tersebut dilarang, maka dikuatkan praktek riba (*al-fakhsy*) sangat memberatkan karena bunganya akan terus berbunga) akan semakin marak.⁴²

c. Hukumnya Tafshil (antara Haram dan Halal)

Bagi kelompok yang ketiga ini, hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu apa yang telah dijelaskan di atas oleh pendapat kedua adalah tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Hukumnya haram, jika memenuhi unsur riba, yaitu tambahan yang sangat memberatkan, sehingga tidak ada unsur saling tolong-menolong. Dalil-dalil yang mereka gunakan dalam memutuskan halal/haramnya jual beli kredit dengan tambahan harga menggunakan dasar pendapat pertama dan kedua di atas.⁴³

3. Syarat Jual Beli Secara Kredit

Agar penudaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harga kredit termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli “saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini dilain waktu”. Jual beli seperti itu batal karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.

⁴² Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, *Hukm Baiy' bit-Taqsith*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 52

⁴³ Chuzaimah Tahido Yanggo, *Mudharat fi al-Fiqh al-Muqarim*, Juz II (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), 32.

- b. Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang pembayaran ditempat transaksi, sehingga sebagai tindakan *preventie* untuk mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu pembayaran.
- c. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat-lipat, karena hal ini termasuk kerusakan, ketamakan, merugikan manusia dan memakan harta sesama secara bathil.
- d. Mengetahui harta pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli (*am nah*).
- e. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Apabila pembeli menyegerakan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya.
- f. Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berhutang terlambat membayar utangnya.
- g. Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain, praktik demikian disebut *tawaruq* dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

4. Jenis-Jenis Kredit

Terdapat beberapa pendapat dalam pengelompokan jenis kredit, namun pada umumnya dikelompokkan berdasarkan :⁴⁴

a. Penggunaanya

Menurut penggunaanya, kredit dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Kredit Konsumtif, ditunjuk kepada nasabah yang memerlukan dana untuk kebutuhan konsumsi.
- 2) Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk keperluan produksi atau usahanya.

b. Keperluan Produksinya

Menurut keperluan produksinya, kredit dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Kredit modal kerja, ditunjuk kepada nasabah yang mengalami kekurangan modal kerja untuk pengembangan usahanya.
- 2) Kredit investasi, ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan barang modal untuk pertumbuhan usahanya.

c. Jangka Waktunya

Menurut jangka waktunya, kredit dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Kredit jangka pendek, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu hingga satu tahun atau tidak lebih dari satu tahun.
- 2) Kredit jangka menengah, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu antara satu hingga tiga tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, yaitu jenis kredit yang mempunyai jangka waktu lebih dari tiga tahun.

⁴⁴ Desi Arthesa, *Bank dan Lembaga Bukan Bank* (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006), 175.

d. Cara penggunaan

Menurut cara penggunaannya kredit dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

- 1) Kredit rekening koran bebas, yaitu jenis kredit dimana debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan pemakaian tidak dibatasi, namun disesuaikan dengan maksimum kredit yang diberikan.
- 2) Kredit rekening koran terbatas, yaitu jenis kredit dimana debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran, namun terdapat pembatasan dalam pemakaiannya.
- 3) Kredit rekening koran Aflopend, yaitu jenis kredit dimana penarikan dilakukan sekaligus pada waktu penarikan pertama dan pembayaran dilakukan secara mengangsur.
- 4) Kredit Revolving, yaitu jenis kredit dengan penarikan yang sama dengan rekening koran bebas, namun dibedakan menurut cara pemakaiannya.

5. Fungsi Kredit

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu organisasi-organisasi bank selalu diikutsertakan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek, dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :⁴⁵

⁴⁵ Thomas Suyatno, H.A Chalik, dan Made Sukada, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi ke 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 16-17.

- a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
 - 1) Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
 - 2) Para pemilik uang / modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro, bilyet, dan wesel. Sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro, bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.
- c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.
- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilisasi ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain:

- 1) Pengendalian inflansi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan laju inflasi, pemerintah melaksanakan kebijakan uang ketat melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat non-spekulatif.

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa di ekspor. Kebijakan tersebut telah berhasil dengan baik.

e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya tersebut, namun adakalanya diabatasi oleh kemampuan dibidang permodalan, bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha dibidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melakukan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

- g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antarnegara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.⁴⁶

Sedangkan menurut Muhammad Muslehuddin fungsi utama kredit adalah memberi kemungkinan kepada seorang pengusaha untuk memulai suatu usaha secara besar-besaran (skala besar). Kredit digunakan untuk menggerakkan modal yang ada dan memungkinkan dimulainya produksi sebelum berkembangnya permintaan, yaitu peningkatan penjualan hasil produksi kepada konsumen.

⁴⁶ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, cet ke-3 (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004), 36.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006
- Abu Zakariyah Yahya bin Syarf al-Nawawi al-Dimasyq. *Shahih Muslim Bisyarh al-Nawawi*, juz 6, Beirut: Dar al-Fik, 1995
- Ahm'ad ibn 'Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, *Majmu' al – Fatawa*, XVII, t.t.p.: Dar al-Wafa', 2005
- Ahmad Farid, Syaikh *60 Biografi Ulama Salaf*, terj: Masturi Ilham & Asmu'i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006
- Al-Amien Ahmad al-Hajj Muhammad, *Hukm Baiy' bit-Taqsih*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya* Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Al-Qadi al-Husain bin Muhammad al-Magribi (w.1119). *Al –Badr al Taman Syarh Buluq al- Marsm*, juz 6 Tk, Dar Hij, 2007
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 12, Bandung: al-Ma'arif, 1996
- Arthesa Desi, *Bank dan Lembaga Bukan Bank*, Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006
- Aziz Muhammad Azzam Abdul, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cetakan ke 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Black Antony, *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*, Abdullah Ali dan Mariana Ariestywati (terj.) Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014

- Dimyauddin Duwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Gozali Ahmad, *Serba-Serbi Kredit Syariah: Jangan Ada Bunga Diantara Kita*, Jakarta : PT Elex Media Koputindo, 2005
- Harun Hazniel, *Hukum Perjanjian Kredit*, Yogyakarta : Tritura, 1989
- Ibn Sa'id Ruslan Muhammad, *Hawl Hayah Syaykh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Jaza'ir* : Dar al-Furqan, 2010
- Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, terj: H. Muhyiddin Mas Rida, H. Moh. Abidin Zuhri, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007
- Imam Nawawi, *Al Majmu 'Syarah Al Muhadzdzab*, XI (Beirut: Dar al-Fikr, T. Th),
- Iryani, Eva "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No.2 2017
- J Bruno Frank, *Kamus Istilah Kunci Psikologi*, Yogyakarta : Kanisius, 1989
- K. Lubis Surahwardi, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Lexy J Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Resda Karya, 2001
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al - Muwaqqi'in*, II Bayrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991

- Muhibbuddin, "Kredit: Suatu Perjanjian Perspektif Hukum Islam," *Al-Mizan*, Vol. 13, no 02 2017
- Mukhlisin, "Pembelajaran Al-Qur'an Perspektif Imam Al-Nawawi Dalam Kitab Al-Tibyan fi abadi hamalati Al-Quran (BAB ke Empat)," *al-iltizam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016
- Muslehuddin Muhammad, *sistem perbankan dalam islam*, cet ke-3, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Nurdiana Dewi, *Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan Pemikiran Erwandi Tarmiz*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2019
- Parmono Agung dan Andrian Kurniawan, "Penerapan Akutansi Perbankan Pembiayaan Emas iB Hasanah dan Gadai Emas", *Al-Mashraf*, vol, 2, no. 1 Oktober 2015
- Prasetyo, Vian, *Studi Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSNMUI/V/2010 Tentang Kebolehan Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai* Semarang: IAIN Walisongo, 2013
- Putra Irawan Ryco, *Pandangan Empat Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Tentang Hukum Preaktek Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014
- Rachman Aida, *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014

- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mua'malah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Sudarto, *Ilmu Fikih: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, cetakan ke 5, Jakarta: Rajawali Pers, 1990
- Sunhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981
- Suyatno Thomas, H.A Chalik, Made Sukada, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi ke 4, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Tahido Yanggo Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Yahya Agusni, "Fiqh al-Hadis Ibn Taymiyyah tentang Pluralisme agama", *Substantia*, vol. 12, no. 1 April 2011
- Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, *Sirah al - Zatiyyah li Syaykh al-Islam Ibn Taimiyyah* 'Amman: Dar al-Hamid, 2007
- Zakki Zamani, Ahmad *Istidlal* Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai, *Al-Banjari*, Vol. 15, no 1, Januari 2016